

## UPAYA MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN (Studi Literatur)

Oleh:

Rina Nuraini Selly<sup>1)</sup>

Email: [ennynuraini535@gmail.com](mailto:ennynuraini535@gmail.com)

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal guna mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang efektif dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat itu sendiri, dan juga swasta. Kesimpulannya, peran masyarakat dalam berpartisipasi aktif, melakukan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, pelatihan keterampilan, dan dukungan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pemberdayaan. Saran yang diajukan adalah perlunya sinergi antar-pemangku kepentingan serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*

### A. Pendahuluan

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, masyarakat harus terlibat secara aktif, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi penting untuk mencapai tujuan SDGs 2030, termasuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dalam upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, namun seringkali belum dikelola secara optimal.

Pemberdayaan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah, merencanakan solusi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Masyarakat desa harus sebagai objek dalam pembangunan, bukan objek pembangunan, dengan rencana yang tepat. Tulisan ini membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, termasuk peran pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>1)</sup> Rina Nuraini Selly, Dosen Tetap Dpk Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

Berbagai permasalahan yang seringkali dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam program pemberdayaan.
2. Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Minimnya pelaksanaan pelatihan dan keterampilan pada program pemberdayaan.
3. Minimnya infrastruktur pendukung. Seperti fasilitas transportasi, listrik, dan akses internet yang belum memadai dan hal ini dapat menghambat pengembangan usaha.
4. Lemahnya kelembagaan. Struktur organisasi dan manajemen belum dijalankan dengan baik.
5. Ketergantungan pada bantuan eksternal. Kerapuhan mental disebabkan ketergantungan bantuan pemerintah atau pihak luar, tanpa mengembangkan inisiatif mandiri.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang telah ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat tidak cukup dengan tenaga fisik saja, tetapi perlu dengan pemikiran, penemuan-penemuan, semangat, pengorbanan dan kerja keras yang memberi nilai tambah dan manfaat bagi rakyat banyak. Oleh karena itu perlu adanya pemimpin dan penduduk yang berkualitas, mempunyai tingkat kesehatan yang prima, tingkat pendidikan yang tinggi, dan mampu bekerja keras sesuai dengan pilihannya guna mencapai terwujudnya kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan dapat dikatakan memimeiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan-kelemahan seperti yang disebutkan itu mengakibatkan sikap ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemberdayaan menurut Djohani (2003) dalam Anwas (2014:49), adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Menurut Slamet dalam Anwas (2014:49-50), lebih menekankan bahwa hakekat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Mampu di sini bermakna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu juga dalam bertindak sesuai inisiatif. Selanjutnya menurut Suharto dalam

Anwas (2014:50) mengatakan bahwa indikator dalam pemberdayaan, paling tidak memiliki empat hal, yaitu:

1. Merupakan kegiatan yang terencana,
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat,
3. Prioritas bagi ke ompok yang lemah atau kurang beruntung,
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu dan kelompok mendapatkan kontrol atas kehidupan mereka dengan meningkatkan partisipasi, keterampilan, sumber daya, dan wewenang untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka (WHO, 2020). Selanjutnya diutarakan oleh UNDP (2023), Pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan yang fokus pada inklusi, partisipasi, dan penguatan kapasitas lokal untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pada pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam upaya meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk dapat mandiri. Pemberdayaan juga dipandang sebagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Menurut Pranarka dan Mujiarto dalam Anwas (2014:50) mengutarakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud diberbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemberdaayaan juga bermakna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Fokus dari pemberdayaan dapat dikategorikan dalam dua sifat, yaitu: bersifat individu dan komunitas. Pemberdayaan bersifat individu adalah merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing guna mencapai kemandirian. Pemberdayaan yang bersifat komunitas merupakan proses dalam meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu agar dapat mengatur komunitasnya sendiri.

Proses adalah suatu hal yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Suatu ukuran keberhasilan pada pelaksanaan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin besar atau banyak masyarakat yang terlibat dalam proses kegiatan pemberdayaan, maka semakin berhasil kegiatan pemberdayaan yang dicapai.

## **2. Pemberdayaan dan Pembangunan**

Pembangunan manusia adalah perluasan pilihan-pilihan manusia dengan meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan kebebasan hidup yang bermartabat (UNDP, 2020). Upaya meningkatkan kesejahteraan dan berkelanjutan kehidupan masyarakat, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan (*development*) merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Pemberdayaan masyarakat merupakan

proses meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk mengambil alih kontrol kehidupan mereka sendiri melalui peningkatan akses mereka terhadap sumber daya, pemahaman mereka, dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2022). Namun demikian, pembangunan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera (UNDP, 2023).

Menurut Chamber (2023), pembangunan yang berkelanjutan harus berbasis pada kebutuhan lokal, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku utama perubahan. Dapat dicontohkan, Program pemberdayaan, yang mencakup pelatihan kewirausahaan, penguatan kelembagaan lokal, dan literasi digital, telah terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan marginal (Bappenas, 2003).

Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menekankan bahwa untuk mencapai target pembangunan global, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama (UN, 2023).

Berbagai program di Indonesia, seperti pengembangan koperasi, Desa Mandiri, dan Program Keluarga Harapan (PKH), menerapkan gagasan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi kemiskinan, menurut Evaluasi Bappenas tahun 2023. Kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel masih diperlukan untuk mengatasi masalah seperti korupsi, kesenjangan digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan merupakan dua aspek yang berproses untuk saling melengkapi. Tanpa adanya pemberdayaan, pembangunan akan cenderung tidak inklusif dan berkelanjutan. Begitu juga sebaliknya, tanpa kerangka pembangunan yang sistematis, pemberdayaan masyarakat mungkin saja tidak akan mencapai dampak yang luas. Oleh karena itu, integrasi kedua konsep ini dalam kebijakan publik menjadi kunci menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

### 3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Sebagai agen atau pelaksana pemberdayaan kepada masyarakat, perlunya memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan acuan sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan dapat dijalankan dengan benar. Prinsip-prinsip ini juga mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, yaitu:

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.

- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, bertahap, dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.
- g. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu untuk dilakukan secara holistik pada semua aspek kehidupan di masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja, ibu-ibu mud sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan juga pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar.
- j. Pemberdayaan perlu adanya keragaman budaya, untuk itu perlu adanya berbagai metode dan pendekatan yang digunakan di lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat.
- l. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas pelaksana pemberdayaan perlu memiliki kompetensi yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak terkait dalam masyarakat, yaitu unsur pemerintah, tokoh, akademisi, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya, sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

#### **4. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat ini juga akan dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Sulistiyani (2004; 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/materil. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Obyek atau sasaran pemberdayaan dapat diarahkan pada manusia (human) dan wilayah/kawasan tertentu. Pemberdayaan yang diarahkan pada manusia dimaksudkan untuk menaikan martabatnya sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan meningkatkan derajat kesehatannya agar mereka dapat hidup secara lebih produktif. Upaya ini dilakukan melalui program penguatan kapasitas.

Dalam kerangka perencanaan, penentuan kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan umum (universal) dan pendekatan khusus (ideal). Pada pendekatan universal, pemberdayaan diberikan kepada masyarakat. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mudah untuk diterapkan, namun kekurangannya adalah adanya disparatis atau kesenjangan pemahaman yang cukup tinggi. Sedangkan pendekatan ideal, menekankan bahwa pola pemberdayaan yang sesuai dengan klasifikasi strata masyarakat. Dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria materi pemberdayaan.

##### **5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Umumnya, strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. cara yang dianggap penting dan dirancang seseorang agar tercapai tujuannya dengan baik. Strategi bersifat inkremental dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang akan tujuan yang diinginkan.

Strategi pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Ife (2013) adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok melalui penguatan partisipasi, pengembangan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan. Sumaryadi (2005), strategi pemberdayaan masyarakat adalah langkah terencana untuk membangun kemandirian masyarakat melalui pelatihan, pendaampingan, dan penguatan kelembagaan agar mampu mengelola pembangunan secara sendiri. Selanjutnya oleh M. Edelman dan A. Mitra (2007) mengatakan bahwa Strategi pemberdayaan melibatkan upaya sistematis untuk meningkatkan kontrol masyarakat atas sumber daya, kebijakan, dan institusi yang memengaruhi kehidupan mereka melalui pendidikan, advokasi, dan pengorganisasian komunitas.

Berdasarkan uraian tentang strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya memiliki tiga arah, yaitu:

*Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;

*Kedua*, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;

*Ketiga*, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan telaahan Suharto, dalam Mardikanto dan Subianto (2013:170), ia mengemukakan lima aspek penting yang dapat dilakukan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu:.,

motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumberdaya, dan pembangunan pengembangan jejaring.

Hal penting dalam penetapan strategi pemberdayaan masyarakat tidak hanya memusatkan perhatian pada sasaran atau pelaku utama saja yaitu individu dan masyarakat, namun yang tak kalah pentingnya juga keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terletak pada kualitas fasilitator dan persepsi wilayah selaku penguasa dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan dan juga sebagai administrator pembangunan, serta pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan.

### C. Analisa dan Pembahasan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dan apa saja yang menjadi permasalahan pada penulisan ini, maka akan dianalisa dan dibahas sebagai berikut:

#### 1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan partisipasi. Keterlibatan masyarakat yang rendah sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan manfaat program, kurangnya rasa memiliki, atau pengalaman masa lalu yang buruk dengan program pembangunan. Faktor sosial-budaya seperti sikap pasif, ketidakpercayaan terhadap pihak luar, dan elitisme lokal juga berperan sebagai penghalang. Akibatnya, karena tidak ada dukungan dari masyarakat, program pemberdayaan cenderung bersifat top-down dan tidak berkelanjutan.

#### 2. Keterbatasan Akses Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang buruk membatasi kemampuan masyarakat untuk mengetahui tentang pemberdayaan, mengelola sumber daya, dan mengakses informasi. Keterampilan yang relevan dengan potensi lokal sulit diperoleh oleh masyarakat jika mereka tidak menerima pelatihan kewirausahaan atau hal teknis lainnya. Hal ini akan menambah jarak antara kemampuan perencanaan program dan kemampuan pelaksanaannya di lapangan.

#### 3. Minimnya Infrastruktur Pendukung

Guna mencapai keberhasilan dalam pemberdayaan, infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, jaringan internet, dan sarana produksi harus tersedia. Distribusi barang, akses ke pasar, komunikasi, dan penyediaan layanan dasar dihambat oleh keterbatasan infrastruktur. Kondisi seperti ini menyebabkan biaya produksi tinggi, mobilitas rendah, dan penurunan peluang ekonomi.

#### 4. Lemahnya Struktur Kelembagaan

Kelembagaan lokal, seperti kelompok tani, koperasi, atau lembaga-lembaga adat, memiliki peran yang sangat penting untuk selalu dapat berkoordinasi, dalam mendistribusi kemanfaatan, dan keberlanjutan program. Namun di sisi lain, kelembagaan yang lemah dapat ditandai oleh manajemen yang tidak transparan, kepemimpinan yang buruk, atau adanya konflik internal, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya secara kolektif dan meminimalkan dukungan eksternal.

#### 5. Ketergantungan pada Pihak Eksternal

Banyak masyarakat terbiasa menerima bantuan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau bantuan tanpa usaha untuk mencapai kemandirian. Ketergantungan menghambat kreativitas lokal dan keinginan untuk mencari solusi mandiri. Selain itu, bantuan yang diberikan secara karitatif sering menyebabkan pola pikir yang pasif dan konsumtif.

#### 6. Optimalisasi Teknologi Informasi

Seringkali pelaksanaan pemberdayaan gagal dalam memanfaatkan teknologi informasi (IT) diantaranya seperti internet, media sosial, platform e-commerce, atau aplikasi pendukung program lainnya dengan baik. Kegagalan dapat terjadi dikarenakan keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, atau kurangnya inisiatif pemerintah dan lembaga pendukung untuk memasukan teknologi informasi ini ke dalam program.

#### 7. Kolaborasi Multi Pihak

Adanya perbedaan pendapat, koordinasi yang kurang baik, dan minimnya mekanisme komunikasi dapat menghalangi bentuk kolaborasi berbagai pihak yang mana melibatkan pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat. Pada sisi lain, seharusnya pihak-pihak ini harus dapat bersinergi guna meningkatkan sumber daya, jaringan dan keberlanjutan program pemberdayaan.

### D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan pada masalah-masalah yang disampaikan pada tulisan ini, melalui pengalaman, literatur, dan sebagainya, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan program akan terganggu dan kemanfaatan yang diharapkan akan berkurang tanpa ada keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dan juga pihak lainnya.
2. Masyarakat tidak akan dapat mengambil peran penting dalam pembangunan jika kapasitas mereka tidak ditingkatkan.
3. Meskipun sumber daya manusia atau ide sudah tersedia, namun program pemberdayaan sering terhambat oleh masalah logistik dan teknis.
4. Ketika pendamping atau pihak eksternal menarik diri, program rawan gagal karena kelemahan kelembagaan.
5. Kemandirian tidak mudah dicapai, dan program pemberdayaan telah kehilangan nilainya sebagai proses meningkatkan kapasitas lokal.
6. Terbatasnya peluang dalam meningkatkan jangkauan program, efisiensi, dan menciptakan inovasi pemberdayaan.
7. Perlunya sinergi dan kolaborasi anatar berbagai pihak dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

### E. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus dapat memperkuat regulasi yang dapat mendorong desentralisasi pemberdayaan. Dapat meningkatkan alokasi dana pemberdayaan guna pelaksanaan pendampingan program.

2. Masyarakat selaku penggiat pemberdayaan diharapkan untuk selalu proaktif dalam membangun jaringan, dapat memanfaatkan berbagai bentuk pelatihan, dapat meningkatkan literasi digital dan juga kapasitas kelembagaan
3. Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan juga dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas melalui riset yang mengarah pada program pemberdayaan masyarakat.
4. Bagi sektor swasta dapat pula berpartisipasi dalam investasi dalam pengembangan produk-produk pemberdayaan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S., & Sumantri, I., 2016, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, Bandung, CV Pustaka Setia

Anwas, M., 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital*, Bandung, Alfabeta

Bappenas, 2023, *Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta

Bappenas, 2023, *Laporan Pencapaian SDGs Indonesia 2023*, Jakarta

Chambers, R., 2023, *Participatory Development: Revisited*, Routledge.

Edelman, M., & Mitra, A., 2007, *Empowerment and Community Planning*, Springer

Ife, J., 2013, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*, Cambridge University Press

Kretzmann, J. & McKnight, J., 1993, *Building Communities from the Inside Out*. ACTA Publications

Liauw, G., 2015., *Administrasi Pembangunan (Studi Kajian PKL)*, Bandung, PT Refika Aditama

Mardikunto, T., & Soebianto, P., 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta

OECD, 2021, *Social Impact Investment: Beyond the Buzzword*. Paris

Sulistiyani, A.M., 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media

Sumaryadi, I. N., 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama

United Nations, 2023, *Sustainable Development Goals Report*

UNDP, 2022, *Community Empowerment in the Digital Age*, New York

UNDP, 2023, *Community Empowerment for Sustainable Development*, New York

UNDP, 2020, *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme

UNDP, 2023, *Human Development Report 2023: Breaking Barriers for Equity*

World Bank, 2022, *Community Empowerment and Sustainable Development*

World Bank, 2018, *PNPM Mandiri: Lessons from Indonesia's Community-Driven Development*

World Health Organization, 2020, *Community Empowerment for Health*. Geneva: WHO

<sup>1)</sup> Rina Nuraini Selly, Dosen Tetap Dpk Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

[https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/17/100000069/strategi--pengertian-tujuan-jenis-dan-contohnya?utm\\_source](https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/17/100000069/strategi--pengertian-tujuan-jenis-dan-contohnya?utm_source)